PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BELANJA MODAL (BM), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-2023

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

KRISVINUS DANDI
NIM.B1013201035

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Krisvinus Dandi
NIM	:	B1013201035
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul TA	:	Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Belanja Modal (BM), dan Alokasi Dana Umum (DAU) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 18 November 2024



Krisvinus Dandi
NIM.B1013201035

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Krisvinus Dandi
NIM	: B1013201035
Jurusan	: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Tanggal Ujian	: 12 Agustus 2024
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Belanja Modal (BM), dan Alokasi Dana Umum (DAU) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 20
Maret 2025



Krisvinus Dandi
NIM.B1013201035

LEMBAR YURIDIS

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BELANJA MODAL (BM), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-2023

Penanggung Jawab Yuridis

Krisvinus Dandi
B1013201035

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 12 Agustus 2024

Majelis Penguji

No.	MajelisPenguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	TandaTangan
1	Pembimbing TA	Dr. Nurul Bariyah, S.E., M.Si NIP 196912011994032004	21-11-2024	
2	Ketua Penguji	Prof. Dr. Hj. Jamaliah, S.E., M.Si NIP 196203091987032007	21-11-2024	
3	Anggota Penguji	Eko Supriyanto, S.E., M.E NIP 199101212019031013	20-11-2024	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 17 JAN 2025
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto,S.E.,M.Sc
NIP.197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul "pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Produk Domestik Regional Bruto PDRB) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat".

Tugas akhir ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan dan memperoleh gelar sarjana strata 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak dan merupakan bentuk dari ilmu yang sudah didapat selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak yang membantu,memberikan masukan dan saran.Dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati menyampaian ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Barkah, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si. Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Nurul Bariyah, S.E., Msi. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Jamaliah, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji Pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Eko Supriyanto, S.E., M.E. selaku Dosen Penguji Kedua yang telah banyak memberikan saran serta masukan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
7. Civitas Akademika dan Dosen Pengajar Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Adnan dan Ibu Yeniarniati. Terutama Ibu Yeniarniati, Terima Kasih atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak terhingga. Berkat doa dan dukungan kedua orang tua, penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibunda tercinta Rita atas dukungan finansial yang telah diberikan sehingga penulis dapat

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

10. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan tugas akhir.
11. Untuk diri sendiri, terima kasih atas semua waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan untuk Tugas Akhir ini. Perjalanan ini tidak mudah, tapi seiring berjalannya waktu penulis berhasil melewatinya. Meskipun sering merasa lelah dan putus asa, tetap berusaha bangkit dan terus maju.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk mencapai karya yang lebih baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan semoga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Pontianak, 20
Maret 2025



Krisvinus Dandi
NIM. B1013201035

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BELANJA MODAL (BM), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-2023

Oleh : Krisvinus Dandi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Produk Domestik Regional Bruto PDRB) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder didapat dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) berupa data panel terdiri dari data *cross section* dan *time series* 14 Kabupaten/Kota. Pada penelitian ini digunakan uji regresi linear berganda diolah dengan dengan alat statistik yaitu software Eviews 12. Adapun model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikant terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan dana alokasi berpengaruh positif dan tidak signifikant terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikant terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Alokasi Uumum, Produk Domestik Regional Bruto

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BELANJA MODAL (BM), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-2023

Oleh : Krisvinus Dandi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

Ringkasan

1. Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kepentingan daerahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah memberikan kebebasan lebih besar bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan melaksanakan pembangunan. Salah satu parameter penting dalam mengukur kemajuan ekonomi suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi, yang dapat didefinisikan sebagai peningkatan aktivitas ekonomi untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Faktor-faktor seperti keunggulan daerah, spesialisasi, dan potensi ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data PDRB di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa Kota Pontianak memiliki PDRB tertinggi pada tahun 2023, sementara Kabupaten Kayong Utara mencatatkan PDRB terendah pada tahun 2020. Peningkatan PDRB yang berkelanjutan mencerminkan kondisi ekonomi yang baik, sedangkan ketidakseimbangan dalam PDRB dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam mendukung keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Data menunjukkan bahwa Kota Pontianak memiliki PAD tertinggi pada tahun 2023, sementara Kabupaten Kayong Utara mencatat PAD terendah pada tahun 2019. PAD digunakan untuk membiayai belanja modal guna meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan PDRB. Namun, data menunjukkan bahwa hubungan antara PAD, belanja modal, dan PDRB tidak selalu sebanding. Belanja modal tertinggi tercatat di Kabupaten Ketapang pada tahun 2019, sementara belanja modal terendah terjadi di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2020. Demikian pula, Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengalami fluktuasi, dengan Kabupaten Ketapang menerima DAU tertinggi pada tahun 2019 dan Kabupaten Kayong Utara menerima DAU terendah pada tahun 2022. DAU berperan dalam meratakan kemampuan keuangan antar-daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Permasalahan

pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerah, masih terdapat ketimpangan dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan Dana Alokasi Umum (DAU) di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak memiliki PDRB dan PAD tertinggi, sedangkan Kabupaten Kayong Utara mencatatkan PDRB dan PAD terendah, yang menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antar daerah. Selain itu, hubungan antara PAD dan PDRB tidak selalu sebanding, di mana beberapa daerah dengan PDRB tinggi belum tentu memiliki PAD yang tinggi. Fluktuasi belanja modal dan DAU di berbagai daerah juga menunjukkan ketidakseimbangan dalam pengalokasian sumber daya keuangan, yang dapat memengaruhi efektivitas pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Tujuan Penelitian

1. untuk Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
3. .Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari Dana Alokasi Umum terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, terdapat 70 observasi yang berasal dari 14 kabupaten/kota selama 5 tahun penelitian.

5. Hasil Penelitian

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat pada taraf signifikansi 5 persen. Peningkatan PAD mendorong pertumbuhan PDRB dengan menyediakan sumber daya keuangan bagi pemerintah daerah untuk investasi di berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan teori neoklasik Solow-Swan, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada akumulasi modal dan peningkatan produktivitas.

Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat pada taraf signifikansi 5 persen. Pengaruh negatif ini disebabkan oleh belanja modal yang kurang tepat sasaran, alokasi anggaran yang mengurangi sektor produktif dalam jangka pendek, serta proyek infrastruktur yang membutuhkan waktu lama sebelum memberikan dampak ekonomi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Meskipun DAU merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah, sebagian besar anggarannya digunakan untuk belanja rutin seperti gaji pegawai dan operasional pemerintahan, yang tidak

langsung meningkatkan produktivitas ekonomi. Karena itu, dampak DAU terhadap PDRB menjadi terbatas.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Adapun Kesimpulan dalam penelitian ini

1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, karena dengan PAD yang tinggi, pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam menggali potensi ekonomi dan meningkatkan akumulasi modal. Kapasitas fiskal yang lebih besar memungkinkan alokasi dana ke sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang pada akhirnya meningkatkan PDRB.
2. Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB, yang berarti peningkatan belanja modal justru menurunkan PDRB. Penyebabnya antara lain alokasi anggaran yang tidak efisien, waktu pelaksanaan proyek yang lama, serta biaya operasional yang tinggi, sehingga belanja modal tidak memberikan dampak positif langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. DAU berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB, karena meskipun berperan dalam mendukung stabilitas pemerintahan dan operasional daerah, alokasinya lebih banyak digunakan untuk belanja rutin seperti gaji pegawai dan operasional pemerintahan. Akibatnya, DAU belum mampu memberikan dorongan kuat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan PDRB secara signifikan.

Adapun rekomendasi dalam penelitian ini

1. Pemerintah daerah perlu menggali potensi lokal yang belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti sektor pariwisata, industri kreatif, dan pertanian. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur yang dibiayai dari PAD harus menjadi prioritas. Penguatan kapasitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas fiskal juga diperlukan agar PAD dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan PDRB.
2. Pemerintah daerah harus lebih selektif dalam mengalokasikan belanja modal dengan memastikan proyek-proyek yang dipilih memberikan dampak ekonomi positif dalam jangka pendek dan panjang. Manajemen proyek yang lebih efektif, pengawasan ketat, serta pemilihan proyek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Sinergi antara belanja modal dan belanja rutin juga diperlukan untuk mendukung peningkatan PDRB secara optimal.
3. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan DAU secara lebih efektif dengan memperbesar porsi untuk belanja produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan investasi dalam sektor strategis. Hal ini dapat meningkatkan multiplier effect dari penggunaan DAU dan mendorong pertumbuhan PDRB yang lebih signifikan. Selain itu, perbaikan dalam perencanaan anggaran daerah diperlukan agar DAU

tidak hanya digunakan untuk belanja rutin, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BELANJA MODAL (BM), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-2023

Krisvinus Dandi[1]

Universitas Tanjungpura, Indonesia

Dr. Nurul Bariyah, S.E., M.Si[2]

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the variable influence of the influence of Regional Original Revenue, Capital Expenditure and General Allocation Fund on Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Regency / City in West Kalimantan Province. This study uses secondary data obtained from the publication of the Central Statistics Agency (BPS) in the form of panel data consisting of cross section and time series data of 14 districts / cities. In this study, multiple linear regression tests were used, processed with statistical tools, namely Eviews 12 software. The most appropriate model used is the Fixed Effect Model (FEM). The results of this study indicate that partially local revenue has a positive and significant effect on Regency / City GRDP in West Kalimantan Province and allocation funds have a positive and insignificant effect on Regency / City GRDP in West Kalimantan Province. While capital expenditure has a negative and significant effect on Regency / City gross regional domestic product in West Kalimantan Province. Simultaneously Local Revenue, Capital Expenditure, and General Allocation Fund affect the Gross Regional Domestic Product of Regency / City in West Kalimantan Province.

Keywords : *Regional Original Revenue, Capital Expenditure , General Allocation Fund, Gross Regional Domestic Product*

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Produk Domestik Regional Bruto PDRB) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder didapat dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) berupa data panel terdiri dari data *cross section* dan *time series* 14 Kabupaten/Kota. Pada penelitian ini digunakan uji regresi linear berganda diolah dengan dengan alat statistik yaitu software Eviews 12. Adapun model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikant terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan dana alokasi berpengaruh positif dan tidak signifikant terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikant terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Alokasi Uumum, Produk Domestik Regional Bruto

[1] B1013201035@student.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kepentingan daerahnya, dan melaksanakan wewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adanya otonomi di suatu wilayah diharapkan pemerintah daerah untuk lebih memahami kebutuhan dan potensi daerahnya. Dengan otonomi, pemerintah daerah memiliki kebebasan yang lebih besar dalam merancang kebijakan, melaksanakan upaya untuk meningkatkan, dan mencapai pembangunan di suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk memantau, mengamati, dan menganalisis kemajuan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan aktivitas ekonomi dengan tujuan meningkatkan produksi barang dan jasa oleh masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi terus meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan mengalami peningkatan yang berkelanjutan (Hasan, 2018). Keunggulan daerah, spesialisasi daerah, dan potensi ekonomi daerah adalah faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut adalah nilai Produk Domestik Bruto (PDRB). Kecepatan pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan merujuk pada PDRB dengan menggunakan harga berlaku atau harga konstan. Kenaikan signifikan setiap tahun dalam PDRB dapat dianggap sebagai indikator bahwa ekonomi daerah tersebut berada dalam kondisi baik dan tidak mengalami masalah yang serius. Sebaliknya, kurangnya penanganan terhadap ketidakseimbangan dalam PDRB dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan setiap tahunnya.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Menurut Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2023 (dalam jutaan rupiah)

No	KAB/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bengkayang	5.714.297	5.600.324	5.842.930	6.161.447	6.449.875
2	Kapuas Hulu	6.389.997	6.234.479	6.510.868	6.804.581	7.118.699
3	Kayong Utara	2.536.742	2.517.551	2.632.989	2.765.563	2.889.467
4	Ketapang	17.999.835	17.911.872	18.848.703	19.876.460	20.088.145
5	Kubu Raya	18.268.641	17.831.725	18.754.974	19.783.108	20.768.220
6	Landak	7.022.009	6.972.047	7.312.662	7.652.352	7.988.197
7	Melawi	3.385.816	3.348.107	3.500.136	3.671.609	3.838.952
8	Mempawah	5.241.754	5.251.037	5.466.323	5.723.030	6.014.544
9	Sambas	13.641.738	13.363.516	13.948.120	14.594.783	15.278.389
10	Sanggau	13.142.288	13.235.261	13.790.449	14.425.583	14.719.798
11	Sekadau	4.294.121	4.252.097	4.435.321	4.661.474	4.880.318
12	Sintang	9.586.052	9.375.708	9.731.976	10.215.011	10.693.381
13	Pontianak	24.804.699	23.822.514	24.919.417	26.159.522	27.404.860
14	Singkawang	6.828.387	6.657.045	6.977.774	7.330.633	7.694.925

Sumber : Kemenkeu 2024

Tabel 1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi kalimantan Barat mengalami penigkatan menunjukkan bahwa Kota Pontianak berhasil mencapai PDRB tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp 27.404.860 dan Kabupaten Kayong Utara mengalami PDRB terendah pada tahun 2020 sebesar Rp 2.517.551 Salah satu tujuan pembangunan di suatu daerah adalah pertumbuhan PDRB yang tinggi dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya kemajuan di daerah tersebut dan kemakmuran ekonomi yang dicapai semakin maju.

Setiap pemerintah di tingkat kabupaten dan kota memiliki hak untuk mengatur dan mengelola keuangan mereka sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsi utama mereka. Mengingat setiap daerah memiliki kebutuhan yang unik, dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan di setiap daerah pun beragam Harapan dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dapat memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan akuntabilitas dan pembiayaan daerah, serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Penurunan ketergantungan pada dana transfer ini menunjukkan peningkatan kemandirian daerah. Sebaliknya, daerah dengan PAD yang rendah cenderung masih membutuhkan dana dari pemerintah pusat, yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah tersebut masih relatif rendah

Penggalian sumber keuangan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pemerintah dalam mendorong kemajuan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar, dan diharapkan bahwa dengan kewenangan tersebut, pemerintah dapat melakukan pengelolaan sumber daya keuangan secara bijaksana. Hal ini mencakup optimalisasi penggalian dana, efisien dalam pengelolaan keuangan, dan pengembangan potensi sumber daya keuangan untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (dalam jutaan rupiah)

No	KAB/KOTA	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Bengkayang	59.461	56.375	58.915	76.766	77.176
2	Kapuas Hulu	82.727	83.609	76.206	66.423	69.906
3	Kayong Utara	22.226	33.889	41.347	39.586	29.649
4	Ketapang	132.829	158.853	196.997	185.327	182.818
5	Kubu Raya	157.829	180.107	160.800	169.190	182.149
6	Landak	84.106	101.867	94.350	78.228	97.868
7	Melawi	41.127	45.734	43.872	65.052	60.065
8	Mempawah	78.723	84.911	100.027	89.783	100.008
9	Sambas	131.267	151.674	131.995	189.205	236.271
10	Sanggau	102.036	104.271	110.900	140.995	140.734
11	Sekadau	56.919	60.543	55.256	72.376	54.448
12	Sintang	150.923	154.473	154.473	192.161	175.429
13	Pontianak	476.837	535.939	538.010	561.865	597.632
14	Singkawang	138.775	161.879	175.001	186.000	211.421

Sumber : kemenkeu 2024

Berdasarkan tabel 2 Perkembangan PAD kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat fluktuatif. Kota Pontianak mencatat PAD tertinggi pada tahun 2023, mencapai Rp 597.632, sementara PAD terendah tercatat pada Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2019, dengan jumlah Rp 22.226. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa hubungan antara PAD dan PDRB di suatu daerah adalah sebanding. jika PDRB di suatu daerah meningkat, maka PAD di daerah tersebut juga akan meningkat (Fadly, 2017).

Peningkatan PAD yang terus meningkat digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah, seperti belanja modal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pembelanjaan anggaran modal diatur berdasarkan kebutuhan daerah terhadap infrastruktur dan fasilitas, yang penting untuk menjalankan tugas pemerintahan dan menyediakan fasilitas publik (Priambudi, 2017). PAD dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan PDRB, seperti belanja modal. Belanja modal diarahkan untuk memperkuat pembangunan ekonomi, termasuk pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat (Hailuddin et al., 2022)

Tabel 3.

Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (dalam jutaan rupiah)

No	KAB/KOTA	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Bengkayang	249.958	166.997	153.381	368.209	285.938
2	Kapuas Hulu	436.983	358.472	379.622	259.186	256.627
3	Kayong Utara	179.227	89.925	218.217	97.601	108.925
4	Ketapang	670.238	454.826	543.921	448.452	477.137
5	Kubu Raya	226.817	225.095	228.338	193.359	169.591
6	Landak	209.342	286.090	172.326	199.923	219.656
7	Melawi	284.809	194.843	201.932	156.787	128.142
8	Mempawah	153.240	206.655	179.061	196.949	157.135
9	Sambas	318.910	329.544	270.670	219.205	181.611
10	Sanggau	324.067	265.113	207.160	121.175	279.808
11	Sekadau	180.106	278.462	142.121	200.999	165.054
12	Sintang	347.947	364.932	317.215	177.167	192.904
13	Pontianak	435.824	509.589	422.163	507.199	516.665
14	Singkawang	199.524	151.567	190.870	108.133	143.224

Sumber : Kemenkeu 2024

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa Perkembangan belanja modal kabupaten/kota di provinsi Kalimantan barat fluktuatif. Belanja modal tertinggi adalah Kabupaten Ketapang sebesar Rp 670.238 pada tahun 2019 dan belanja modal terendah adalah kayong utara sebesar Rp 89.925 pada tahun 2020. Ini bertentangan dengan prinsip bahwa hubungan antara pendapatan asli daerah, belanja modal, dan produk domestik regional bruto di suatu daerah adalah sebanding, jika pendapatan asli daerah di suatu daerah meningkat, maka Belanja Modal di daerah tersebut juga akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produk domestik regional bruto.

Dari Tabel 1.4 diketahui bahwa perkembangan dana alokasi umum kabupaten dan kota di provinsi kalimantan barat fluktuatif dengan tertinggi adalah Kabupaten Ketapang

sebesar Rp 1.148.116 pada tahun 2019 dan dana alokasi umum terendah adalah kayong utara sebesar Rp 445.774 pada tahun 2022. Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan maksud untuk meratakan kemampuan keuangan antar-daerah guna mendukung pembiayaan kebutuhan daerah dalam konteks pelaksanaan Desentralisasi. Semakin besar jumlah dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah, maka akan terlihat dampak positifnya pada pembiayaan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan kata lain, besarnya belanja pemerintah untuk pembangunan ekonomi juga akan meningkat, yang pada gilirannya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan (Arina et al., 2019)

Tabel 4.

Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (dalam jutaan rupiah)

No	KAB/KOTA	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Bengkayang	599.564	547.392	561.038	543.574	578.328
2	Kapuas Hulu	996.870	900.430	920.588	893.023	924.279
3	Kayong Utara	486.572	447.780	459.627	445.774	461.705
4	Ketapang	1.148.116	1.040.647	1.066.408	1.034.131	1.091.069
5	Kubu Raya	806.956	726.710	742.123	719.085	788.990
6	Landak	683.669	611.307	628.618	608.634	655.526
7	Melawi	616.673	557.378	571.472	554.276	573.676
8	Mempawah	598.337	539.546	549.230	531.670	556.801
9	Sambas	894.193	813.947	830.338	840.339	884.773
10	Sanggau	843.058	747.179	764.907	741.779	790.867
11	Sekadau	514.671	467.314	479.198	464.251	482.593
12	Sintang	933.800	843.501	864.890	838.160	891.501
13	Pontianak	726.770	658.270	668.160	646.761	710.592
14	Singkawang	517.070	465.326	472.145	457.024	478.164

Sumber : kemenku 2024

Penelitian lain juga dilakukan oleh Wardhiah (2018) yang menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, akan tetapi pada Belanja Modal tidak memiliki pengaruh langsung terhadap PDRB. Sedangkan penelitian Hasrini (2021) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap PDRB. Tingginya tingkat penerimaan PAD juga dapat meningkatkan belanja modal secara langsung akan meningkatkan PDRB pada suatu daerah. Hasil penelitian Marpaung et al (2017) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sumartini & Yasa (2015) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian juga dilakukan oleh Priambodo (2014) dan Amalia & Aulya (2014) yang berpendapat bahwa PAD dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, namun masih kecil sehingga perlu adanya perhatian pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

Banyak kajian yang telah dilakukan menunjukkan perbedaan kesimpulan dan pandangan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya yang membahas pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan, baik dalam pengaruh yang signifikan maupun tidak signifikan antara masing-masing variabel. Penulis tertarik untuk menggali lebih lanjut apakah di Provinsi Kalimantan Barat, yang terdiri dari 14 Kabupaten/Kota, terdapat kesimpulan serupa di mana tingkat Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum berbeda-beda antara satu dengan lainnya, sejalan dengan tingkat Produk Domestik Regional Bruto yang juga beragam.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan

1. untuk Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
3. .Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari Dana Alokasi Umum terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat